



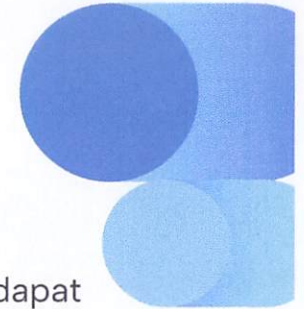
MANUAL INDIKATOR KINERJA TAHUN 2024

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

BerAKHLAK  **# bangga melayani bangsa** **#2024 KKP BEYOND**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Setiap indikator kinerja harus dilengkapi dengan manual indikator kinerja yang merupakan dokumen/penjelasan mengenai indikator kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja. Manual IKU memuat beberapa hal di antaranya defisini, formula perhitungan, satuan, tingkat validasi, polarisasi, periode pelaporan, dan lain sebagainya. Manual IKU ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengevaluasi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Manual IKU Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2024.

Kendari, 12 Januari 2024

Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari,



Syahril Abd. Raup
Syahril Abd. Raup



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	02
Daftar isi	03
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	05
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	06
Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	07
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	08
Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	09
Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	11
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	12
Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan	13
Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan	14
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	15
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	16



DAFTAR ISI

Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	17
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	18
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	19
Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	20
Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	21
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	22

01

PENERIMAAN PNBP NON SDA DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan : Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Nama IKU : Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Definisi :

- Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.
- Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)

Formula Perhitungan : Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ket: Nilai TW I = Capaian TW I; Nilai TW II = Capaian TW I + TW II; Nilai TW III = Capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = Capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

Satuan : Juta Rupiah **Polarisasi** : Maximize

Tingkat Validitas : Output Kendali Rendah **Periode Pelaporan** : Triwulan

Sumber Data : Tim Kerja Pelayanan Usaha **Metode Cascading** : Tidak Diturunkan

Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir **Target** : 5,445.01

VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

02

Sasaran Kegiatan : Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat

Nama IKU : Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Definisi : Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah

Formula Perhitungan : $Prod_{\text{perikanan Tangkap}} = Prod_{\text{PTL}} + Prod_{\text{PTPD}}$

Keterangan:

$Prod_{\text{PTL}}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut

$Prod_{\text{PTPD}}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I

Nilai TW II = capaian TW I + TW II

Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III

Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

Satuan : Ton

Tingkat Validitas : Outcome

Sumber Data : Tim Kerja Operasional Pelabuhan

Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir

Polarisasi : Maximize

Periode Pelaporan : Triwulan

Metode Cascading : Tidak Diturunkan

Target : 16.000

03

PERSENTASE PERMOHONAN PENGUSAHAAN YANG DIANALISA DAN/ATAU DIEVALUASI DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Berdaya Saing
Nama IKU	: Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. • Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBK yang berlaku di KKP di antaranya meliputi penerimaan dari pelabuhan perikanan, di antaranya melalui sewa lahan/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisa atau evaluasi permohonan pengusahaan
Formula Perhitungan	<p>Indikator I = $\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Pengusahaan terhadap Usulan Pengusaha yang dianalisis dan atau dievaluasi}}{\text{Total jumlah usulan pengusahaan yang masuk di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari}} \times 80\%$</p> <p>Indikator II = Ruang lingkup pelayanan pengusahaan yang tersandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20%</p> <p>Persentase Pengusahaan = Indikator I + Indikator II</p>
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi
Sumber Data	: Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Pengusahaan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir

Polarisasi

: Maximize

Periode Pelaporan

: Tahunan

Metode Cascading

: Tidak Diturunkan

Target

: 100

TINGKAT KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

04

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Berdaya Saing

Nama IKU : Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Definisi : Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi : 1) administrasi dan sistem informasi; 2) fasilitas pelabuhan perikanan; 3) pelayanan umum; 4) investasi dan industri.

Formula Perhitungan :
$$NK = \frac{\text{Bobot}(A) \times \text{Skala}(S)}{4}$$

Keterangan:

1. Sangat baik jika NK = (86-100)
2. Baik jika NK = (66-85)
3. Sedang jika NK = (46-65)
4. Kurang jika NK = (0-45)

Parameter penilaian meliputi administrasi dan sistem informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter) pelayanan publik (9 parameter), dan investasi dan industri (3 parameter)

Satuan : Nilai

Polarisasi : Maximize

Tingkat Validitas : Output Kendali Rendah

Periode Pelaporan : Triwulan

Sumber Data : Aplikasi PIPP (Tim Kerja Operasional Pelabuhan)

Metode Cascading : Tidak Diturunkan

Pola Perhitungan : Rata-Rata

Target : 84

05

TINGKAT PELAYANAN KESYAHBANDARAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Berdaya Saing

Nama IKU : Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Definisi : Merupakan indikator yang menunjukkan:

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%)
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)

Formula Perhitungan :

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x1)
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2)
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = $100 - [(jumlah\ permintaan\ verifikasi\ SHTI / jumlah\ SHTI\ yang\ diterbitkan) \times 100]$ (x3)

Tingkat pelayanan = $x1 + x2 + x3$

Satuan : Persen

Polarisasi : Maximize

Tingkat Validitas : Output Kendali Tinggi

Periode Pelaporan : Tahunan

Sumber Data : Tim Kerja Kesyahbandaran

Metode Cascading : Tidak Diturunkan

Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir

Target : 85

PERSENTASE PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

06

Sasaran Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal

Nama IKU : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Definisi : Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya

Formula Perhitungan :
$$\frac{\text{Pengembangan Fasilitas Existing (Ha)}}{\text{Luas Pelabuhan Perikanan Sesuai Masterplan (Ha)}} \times 100\%$$

Satuan : Persen **Polarisasi** : Maximize

Tingkat Validitas : Output Kendali Rendah **Periode Pelaporan** : Tahunan

Sumber Data : Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana **Metode Cascading** : Tidak Diturunkan

Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir **Target** : 80

07

NILAI PENGENDALIAN LINGKUNGAN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan : Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal

Nama IKU : Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Definisi :

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.
- SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.

Formula Perhitungan : Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)

Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN)

Kategori

Kurang : 0-30

Baik : >61 - 80

Cukup : >30-60

Sangat Baik : >81 - 100

Ket: Nilai TW I = Capaian TW I; Nilai TW II = Capaian TW I + TW II; Nilai TW III = Capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = Capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

Keterangan:

Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan)

Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

Satuan : Nilai **Polarisasi** : Maximize

Tingkat Validitas : Output Kendali Tinggi **Periode Pelaporan** : Triwulan

Sumber Data : Aplikasi Selaraskan (Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana) **Metode Cascading** : Tidak Diturunkan

Pola Perhitungan : Rata-Rata **Target** : 30,1

KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH YANG MEMENUHI KETENTUAN

08

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Nama IKU : Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Definisi : Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Formula Perhitungan : Jumlah kapal yang diterbitkan dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Ket: Nilai TW I = Capaian 2023 + Capaian TW I; Nilai TW II = Capaian 2023 + Capaian TW I + TW II; Nilai TW III = Capaian 2023 + Capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = Capaian 2023 + Capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

Satuan : Kapal

Polarisasi : Maximize

Tingkat Validitas : Output Kendali Tinggi

Periode Pelaporan : Triwulan

Sumber Data : Tim Kerja Kesyahbandaran

Metode Cascading : Tidak Diturunkan

Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir

Target : 1322

09

PERSENTASE PENINGKATAN PENGETAHUAN KOMPETENSI DAN PERLINDUNGAN NELAYAN/AWAK KAPAL PERIKANAN

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Nama IKU : Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan

Definisi : Merupakan indikator yang menunjukkan persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi kompetensi layak laut, layak tangkap dan layak simpan serta yang memiliki dokumen perlindungan awak kapal perikanan sebagaimana tercantum dalam PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan

Formula Perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL/PKL dan sudah tersertifikasi di PPS Kendari}}{\text{Jumlah awak kapal/nelayan yang memiliki E-PKL/PKL di PPS Kendari}} \times 100\%$$

Satuan : Persen **Polarisasi** : Maximize

Tingkat Validitas : Output Kendali Tinggi **Periode Pelaporan** : Tahunan

Sumber Data : Tim Kerja Kesyahbandaran **Metode Cascading** : Tidak Diturunkan

Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir **Target** : 30

NILAI PM PEMBANGUNAN ZI PELABUHAN PERIKANAN (YANG TELAH DINILAI WBK) DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

10

Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Nama IKU	: Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan		
Definisi	: Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik		
Formula Perhitungan	: Merupakan indikator dari nilai hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang mencakup 6 Area Pengungkit dan 2 Area Komponen Hasil serta mengacu kepada Juknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Data dukung berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE) hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Unit Kerja		
Satuan	: Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi	Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: LKE PM Pembangunan ZI (Tim Kerja Dukungan Manajerial)	Metode Cascading	: Tidak Diturunkan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir	Target	: 80

11

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Nama IKU : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Definisi : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan

Formula Perhitungan :
$$RHP = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

RHP = Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan

$\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT

Satuan : Persen

Polarisasi : Maximize

Tingkat Validitas : Output Kendali Tinggi

Periode Pelaporan : Triwulanan

Sumber Data : Itjen KKP (Tim Kerja Dukungan Manajerial)

Metode Cascading : Tidak Diturunkan

Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir

Target : 80

NILAI REKONSILIASI KINERJA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

12

Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Nama IKU	: Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Definisi	: Rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap adalah Proses evaluasi cepat terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Rekonsiliasi kinerja dilakukan untuk Meningkatkan pemahaman para pengelola kinerja di seluruh satuan kerja KKP, Menjadi sarana bersama untuk mengidentifikasi terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan kinerja dan Sebagai sarana pendampingan terhadap Eselon II DJPT untuk mengawal SAKIP menjadi lebih baik. Terdapat 4 aspek penilaian diantaranya adalah Aspek Kepatuhan (Bobot 25%), Aspek Kesesuaian (Bobot 25%), Aspek Ketercapaian (Bobot 30%), dan Aspek Ketepatan (20%)		
Formula Perhitungan	: Dihitung dari hasil penilaian atas implementasi SAKIP di DJPT dengan menggunakan instrumen Kertas Kerja Rekonsiliasi sesuai ketentuan yang berlaku		
Satuan	: Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi	Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: LKE Rekonsiliasi Kinerja (Tim Kerja Dukungan Manajerial)	Metode Cascading	: Tidak Diturunkan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir	Target	: 94

IP ASN DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Nama IKU	: Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Definisi	: Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).		
Formula Perhitungan	: Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami)		
Satuan	: Indeks	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi	Periode Pelaporan	: Semesteran
Sumber Data	: Ropeg KKP (Tim Kerja Dukungan Manajerial)	Metode Cascading	: Tidak Diturunkan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir	Target	: 84

TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

14

Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Nama IKU	: Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Definisi	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
Formula Perhitungan	: Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut: <ul style="list-style-type: none">• Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)• Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).• Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).• Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).		
Satuan	: Persen	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi	Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: LKE PM Tingkat Kepatuhan PBJ (Tim Kerja Dukungan Manajerial)	Metode Cascading	: Tidak Diturunkan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir	Target	: 80

TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Nama IKU	: Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Definisi	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		
Formula Perhitungan	: Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur: <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%); • Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); • Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2019–2022 (bobot 20%); • Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); • Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%). 		
Satuan	: Persen	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi	Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: LKE PM Tingkat Kepatuhan BMN (Tim Kerja Dukungan Manajerial)	Metode Cascading	: Tidak Diturunkan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir	Target	: 80

NILAI IKPA PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

16

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Nama IKU : Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Definisi : Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Formula Perhitungan : Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi

Satuan : Nilai **Polarisasi** : Maximize

Tingkat Validitas : Output Kendali Tinggi **Periode Pelaporan** : Semesteran

Sumber Data : Aplikasi OMSPAN Kemenkeu (Tim Kerja Dukungan Manajerial) **Metode Cascading** : Tidak Diturunkan

Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir **Target** : 93,76

NILAI KINERJA ANGGARAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Nama IKU	: Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Definisi	: Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya		
Formula Perhitungan	: Menggunakan PMK No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atsa Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dengan bobot penilaian Capaian output 43,5%; Efisiensi 28,6%; Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan 18,2%; Penyerapan Anggaran 9,7%		
Satuan	: Nilai	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi	Periode Pelaporan	: Tahunan
Sumber Data	: Aplikasi SMART Kemenkeu (Tim Kerja Dukungan Manajerial)	Metode Cascading	: Tidak Diturunkan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir	Target	: 86

NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

18

Sasaran Kegiatan	: Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Nama IKU	: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari		
Definisi	: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)		
Formula Perhitungan	: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP		
Satuan	: Indeks	Polarisasi	: Maximize
Tingkat Validitas	: Output Kendali Tinggi	Periode Pelaporan	: Triwulan
Sumber Data	: Aplikasi SISUSAN KKP (Tim Kerja Dukungan Manajerial)	Metode Cascading	: Tidak Diturunkan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir	Target	: 88,3